

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2022

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Denpasar, 31 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Anggiat Napitupulu

NIP. 197202031999031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Denpasar, 31 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Anggiat Napitupulu

NIP. 197202031999031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35,725,739 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp35,725,739 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17,121,207,906 atau mencapai 98.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17,417,927,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp250,771,586,373 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2,616,900; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp250,768,969,473 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp32,049,266 dan Rp250,739,537,107

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35,725,739 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18,991,917,566 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-18,956,191,827, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-1,430,625 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-18,957,622,452.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp252,552,140,639, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-18,957,622,452 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 246,880,625 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 16,898,138,295 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp250,739,537,107

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

U R A I A N	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	35,725,739	-	46,014,259
JUMLAH PENDAPATAN		-	35,725,739	-	46,014,259
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	11,650,383,000	11,536,009,176	99.02	11,310,777,036
Belanja Barang	B.2.2	5,332,367,000	5,151,992,370	96.62	6,198,738,094
Belanja Modal	B.2.3	435,177,000	433,206,360	99.55	1,982,741,200
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		17,417,927,000	17,121,207,906	98.30	19,492,256,330



Denpasar, 31 Desember 2022
Kepala Kantor Wilayah



Anggkat Naptun secara elektronik oleh :
NIP. 197202031999031001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	35,725,739	32,153,558
Jumlah Pendapatan		35,725,739	32,153,558
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	11,536,009,176	11,310,775,673
Beban Persediaan	D.4	157,035,335	166,460,305
Beban Barang dan Jasa	D.5	3,659,805,689	4,400,207,795
Beban Pemeliharaan	D.6	599,054,371	715,267,500
Beban Perjalanan Dinas	D.7	739,195,070	921,683,166
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	2,300,817,925	2,401,945,244
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		18,991,917,566	19,916,339,683
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(18,956,191,827)	(19,884,186,125)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(1,430,625)	8,176,000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	6,229,881
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(1,430,625)	14,405,881
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(18,957,622,452)	(19,869,780,244)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(18,957,622,452)	(19,869,780,244)



Denpasar, 31 Desember 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	252,552,140,639	252,475,075,313
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(18,957,622,452)	(19,869,780,244)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	246,880,625	(68,943,591)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	246,880,625	(68,943,591)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		246,880,625	(68,943,591)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	16,898,138,295	20,015,789,161
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,812,603,532)	77,065,326
EKUITAS AKHIR	E.6	250,739,537,107	252,552,140,639



Denpasar, 31 Desember 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	2,616,900	3,108,933
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		2,616,900	3,108,933
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	230,049,608,000	230,049,608,000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	11,325,634,775	10,787,590,566
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	26,673,665,358	26,673,665,358
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	20,000,000	51,843,386
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(17,299,938,660)	(14,982,227,740)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		250,768,969,473	252,580,479,570
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	798,973,862	908,081,266
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(798,973,862)	(908,081,266)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		250,771,586,373	252,583,588,503
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	32,049,266	31,447,864
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32,049,266	31,447,864
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		32,049,266	31,447,864
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	250,739,537,107	252,552,140,639
JUMLAH EKUITAS		250,739,537,107	252,552,140,639
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		250,771,586,373	252,583,588,503

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Sekretariat Jenderal) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Sekretariat Jenderal) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Sekretariat Jenderal) berkomitmen dengan misi "Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	11,707,499,000	11,650,383,000
Belanja Barang	5,581,005,000	5,332,367,000
Belanja Modal	-	435,177,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	17,288,504,000	17,417,927,000

Realisasi Pendapatan
Rp35,725,739

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35,725,739 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp35,725,739. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya terdapat penerimaan pengembalian belanja modal dan pemanfaatan BMN pada penerimaan pendapatan PNBPN di TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	35,725,739	-
Jumlah	-	35,725,739	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 22.36 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	35,725,739	46,014,259	(22.36)
Jumlah	35,725,739	46,014,259	(22.36)

Realisasi Penerimaan

B.1.1 Penerimaan Pajak

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp35,725,739 dan Rp46,014,259. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami penurunan sebesar 22.36 dari TA 2021 terdapat penerimaan kembali belanja modal dan penerimaan pemindahtanganan BMN (lelang) pada penerimaan PNBP TA 2021. Rincian

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35,725,739	46,014,259	(22.36)
Jumlah	35,725,739	46,014,259	(22.36)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	35,725,739	32,153,558	11.11
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	8,176,000	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5,684,701	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	35,725,739	46,014,259	(22.36)

B.2 Belanja

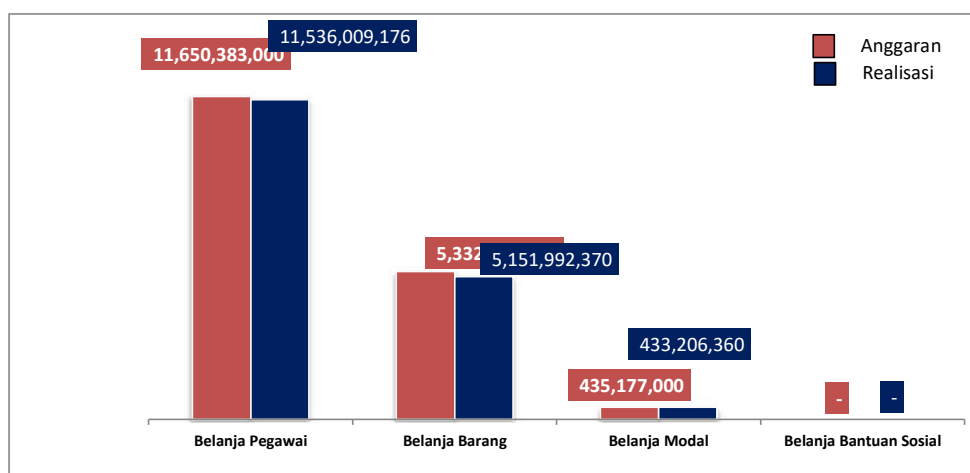
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp17,121,207,906 atau 98.30 % dari anggaran belanja sebesar Rp.17,417,927,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	11,650,383,000	11,536,009,176	99.02
Belanja Barang	5,332,367,000	5,151,992,370	96.62
Belanja Modal	435,177,000	433,206,360	99.55
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17,417,927,000	17,121,207,906	98.30

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12.16% terdapat penurunan pagu anggaran belanja pada TA 2021 dikarenakan adanya blokir anggaran (automatic adjustment) yang dikembalikan ke BUN pada TA 2022. Berikut rincian realisasi belanja TA

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	11,536,009,176	11,310,777,036	1.99
Belanja Barang	5,151,992,370	6,198,738,094	(16.89)
Belanja Modal	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17,121,207,906	19,492,256,330	(12.16)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,536,009,176 dan Rp11,310,777,036. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1.99 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	7,824,553,700	7,654,598,280	2.22
Belanja Pembulatan Gaji PNS	126,246	122,715	2.88
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	560,132,920	529,810,926	5.72
Belanja Tunj. Anak PNS	164,117,856	158,581,294	3.49
Belanja Tunj. Struktural PNS	417,325,000	438,755,000	(4.88)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	539,366,000	505,889,000	6.62
Belanja Tunj. PPh PNS	27,938,080	27,598,341	1.23
Belanja Tunj. Beras PNS	456,463,260	441,689,580	3.34
Belanja Uang Makan PNS	1,301,441,000	1,262,554,000	3.08
Belanja Tunjangan Umum PNS	213,020,000	213,690,000	(0.31)
Belanja Uang Lembur	55,119,000	79,328,000	(30.52)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	11,559,603,062	11,312,617,136	2.18
Pengembalian Belanja Pegawai	23,593,886	1,840,100	1,182.21
Jumlah Belanja	11,536,009,176	11,310,777,036	1.99

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5,151,992,370 dan Rp6,198,738,094. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 16.89% dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja di TA 2022

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	1,710,153,192	1,802,716,539	(5.13)
Belanja Barang Non Operasional	374,606,600	447,088,800	(16.21)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	186,925,602	174,871,552	6.89
Belanja Jasa	1,572,439,835	2,146,388,637	(26.74)
Belanja Pemeliharaan	568,672,071	705,989,400	(19.45)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	739,195,070	921,683,166	(19.80)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5,151,992,370	6,198,738,094	(16.89)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	5,151,992,370	6,198,738,094	(16.89)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp26,851,369 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		6,204,999	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		19,930,370	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		716,000	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	26,851,369	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp433,206,360 dan Rp1,982,741,200. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 78.15% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja modal di TA 2022.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh NIHIL.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp433,206,360 dan Rp1,982,741,200, mengalami penurunan sebesar 78.15 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja modal TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	433,206,360	1,982,741,200	(78.15)

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari NIHIL.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan NIHIL.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan NIHIL.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial NIHIL.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp35,725,739

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp35,725,739 dan Rp32,153,558. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 11.11. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah penghuni rumah dinas. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	35,725,739	32,153,558.00	11.11
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	35,725,739.00	32,153,558.00	11.11

Beban Pegawai
Rp11,536,009,176

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11,536,009,176 dan Rp11,310,775,673.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 1.99 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai dari penerimaan CPNS, mutasi pegawai dan penambahan jabatan fungsional. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	7,801,700,152	7,654,598,280	1.92
Beban Pembulatan Gaji PNS	125,908	121,352	3.75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	560,132,920	529,810,926	5.72

Beban Tunj. Anak PNS	164,117,856	158,581,294	3.49
Beban Tunj. Struktural PNS	417,325,000	438,395,000	(4.81)
Beban Tunj. Fungsional PNS	539,366,000	505,889,000	6.62
Beban Tunj. PPh PNS	27,938,080	27,598,341	1.23
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	11,536,009,176	11,310,775,673	1.99

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp157,035,335 dan Rp166,460,305

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5.66 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	157,035,335	166,460,305	(5.66)
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	157,035,335.00	166,460,305	(5.66)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3,659,805,689 dan Rp4,400,207,795.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16.83 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh penurunan pagu anggaran pada TA 2022. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	1,479,076,693	1,332,436,939	11.01
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,921,500	3,817,600	2.72
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	203,100,000	231,840,000	(12.40)
Beban Barang Operasional Lainnya	17,850,000	216,850,000	(91.77)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,204,999	17,772,000	(65.09)
Beban Bahan	251,321,600	288,894,800	(13.01)
Beban Honor Output Kegiatan	54,500,000	54,000,000	0.93
Beban Barang Non Operasional Lainnya	68,785,000	104,194,000	(33.98)
Beban Langganan Listrik	310,624,872	283,068,475	9.73
Jumlah	3,659,805,689	4,400,207,795.00	(16.83)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp599,054,371 dan Rp715,267,500.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16.25 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh adanya blokir (automatic adjustment) pada anggaran pemeliharaan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179,496,071	163,381,000	9.86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	389,176,000	502,654,000	(22.58)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	30,382,300	49,232,500	(38.29)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	599,054,371	715,267,500	(16.25)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp739,195,070 dan Rp921,683,166

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 19.80 persen disebabkan oleh penurunan pagu anggaran perjalanan dinas disebabkan blokir pada akun perjalanan dinas yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	685,345,070	892,403,166	(23.20)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,850,000	29,280,000	83.91
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	739,195,070.00	921,683,166	(19.80)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh NIHL. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh NIHIL. Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2,300,817,925

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2,300,817,925 dan Rp2,401,945,244.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	865,058,786	967,616,731	(10.60)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,434,328,514	1,434,328,513	0.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	1,430,625	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	2,300,817,925	2,401,945,244	(4.21)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	2,300,817,925	2,401,945,244	(4.21)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-1,430,625 dan Rp8,176,000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	(1,430,625)	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	8,176,000.00	(100)
Jumlah	(1,430,625.00)	8,176,000	(117)

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6,229,881.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	545,180.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5,684,701.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	6,229,881	(100.00)

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

NIHII

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,204,999	17,772,000	(65.09)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	716,000	61,718,000	(98.84)
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	6,920,999.00	79,490,000	(91.29)

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

penurunan beban penanganan Covid-19 dikarenakan sudah mulai menurunnya angka Covid-19

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.252,552,140,639.00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.252,552,140,639.00 dan Rp.252,475,075,313.00

Defisit LO
Rp.18,957,622,452.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.18,957,622,452.00 dan Rp.19,869,780,244.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.246,880,625 dan Rp.-68,943,591 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp246,880,625

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.246,880,625 dan Rp.-68,943,591. .

Koreksi ini adanya penambahan saldo awal berupa hibah satu unit mobil (station wagon) hibah dari

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	254,630,625
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(7,750,000)
Jumlah	246,880,625.0

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp16,898,138,295

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.16,898,138,295 dan Rp.20,015,789,161. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	17,121,207,906
Diterima dari Entitas Lain	(35,725,739)
Transfer Keluar	(279,761,243)
Transfer Masuk	92,417,371
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	16,898,138,295

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp 17,121,207,906, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 35,725,739

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp-279,761,243 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2022

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Station Wagon	LP Karangasem	(245,450,000)
Monografi	Satker Pemasarakatan	(51,843,386)
Jumlah		(279,761,243)

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp92,417,371 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
PC Unit	AHU	23,700,000
Printer	AHU	40,967,371
Jumlah		92,417,371

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2022

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp250,739,537,107*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.250,739,537,107.00 dan Rp.252,552,140,639.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

NIHIL

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan
(Audited) TA 2022 dan 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp2,616,900

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2,616,900 dan Rp3,108,933. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	2,314,900	3,062,433
Bahan untuk Pemeliharaan	302,000	46,500
Jumlah	2,616,900	3,108,933

Persediaan tersebut di atas dalam dalam kondisi baik

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2022. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

U R A I A N	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp230,049,608,000 dan Rp230,049,608,000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	230,049,608,000
Mutasi tambah :	
Saldo Awal	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	230,049,608,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2022

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.580 m2	Jl Ratna 21 Denpasar	12,620,250,000
2	9.730 m2	Jl Ratna 19 Denpasar	76,854,838,000
3	350 m2	Jl Tukad Pancoran	2,577,750,000
4	400 m2	Jl Jayagiri Denpasar	4,568,400,000
Jumlah			230,049,608,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

dalam kondisi baik

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp11,325,634,775

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp11,325,634,775 dan Rp10,787,590,566. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	10,787,590,566
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	245,450,000
Pembelian	433,206,360
Transfer Masuk	64,667,371
Perolehan Lainnya	9,317,340
Koreksi Susulan	7,750,000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	9,317,340
Transfer Keluar	245,450,000
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	2,004,660
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	218,474,862
	-
Saldo per 31 Desember 2022	11,072,734,775
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(9,336,850,633)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,735,884,142

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Mutasi tambah peralatan mesin berupa pencatatan saldo awal hibah 1 unit station wago,
- .
- .
- .

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- mutasi kurang berupa transfer keluar, reklasifikasi dari intra ke ekstra dan penghapusan
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp26,673,665,358

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp26,673,665,358 dan Rp26,673,665,358. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	26,673,665,358
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	26,673,665,358
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(7,963,088,027)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	18,710,577,331

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- nihil
-
-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- nihil
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- NIHIL

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- NIHIL

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.20,000,000 dan Rp.51,843,386. Aset tetap tersebut berupa monografi buku perpustakaan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	51,843,386
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	20,000,000
	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	51,843,386
	-
Saldo per 31 Desember 2022	20,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	20,000,000

Mutasi tambah/kurang:

mutasi tambah berupa transfer masuk dari BPHN dan mutasi kurang berupa transfer keluar ke satker masyarakat di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Bali

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. NIHIL Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp17,299,938,660 dan Rp14,982,227,740. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11,325,634,775	(9,336,850,633)	1,988,784,142
2	Gedung dan Bangunan	26,673,665,358	(7,963,088,027)	18,710,577,331
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	20,000,000	-	20,000,000
Akumulasi Penyusutan		38,019,300,133	(17,299,938,660)	20,719,361,473

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

U R A I A N	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada NIHIL. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	7,750,000
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	7,750,000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	7,750,000

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|---|
| a. | berupa transfer masuk software layanan apostille Ditjen AHU | - |
| b. | | - |
| c. | | - |
| d. | | - |
| e. | | - |

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. NIHIL. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
Dana Lainnya	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

NIHIL

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp798,973,862 dan Rp908,081,266. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	908,081,266
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	218,474,862
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	1,126,556,128
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(798,973,862)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	327,582,266

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 798,973,862

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp798,973,862 dan Rp908,081,266. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	798,973,862	(798,973,862)	-
-	-	-	-
Total	798,973,862	(798,973,862)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp32,049,266

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp32,049,266 dan Rp31,447,864. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :
dgsdfgfdsgjahdfihsdifhshsf

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :
hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-

Total	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdaifsgdhaf

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

NIHIL

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

NIHIL

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

NIHIL

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

NIHIL

Ekuitas Rp250,739,537,107

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp250,739,537,107. dan Rp252,552,140,639. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN